



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.11/K.181/2014

60 87 2014

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 MALINAU
DI DATA DIAN KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan menengah di kecamatan Kayan Hilir perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada siswa sekolah Menengah Atas di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 14 (SMAN 14) Malinau di Data Dian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 3. Undang - Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 |;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau | Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1 |;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2013 tentang perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 | Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 161 |.

- Memperhatikan :**
- a. Jumlah siswa lulusan SMP di Kecamatan Kayan Hilir yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena di Kecamatan Kayan Hilir belum memiliki sekolah menengah;
 - b. Usulan masyarakat Desa Duta Dita Kecamatan Kayan Hilir.

MEMUTUSKAN : _____

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PEMBESIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 MALINAU DI DATA DIAN KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU.
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 (SMAN 14) Malinau di Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Negeri 14 (SMAN 14) Malinau di Data Dian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keketiruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 22 April 2014



Tambahan)

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Inspektori Kabupaten Malinau di Malinau;
6. Kabag Hukum Setkab Malinau di Malinau;
7. Kabag Pengelola Keuangan Setkab Malinau di Malinau;
8. Kecamatan Kayan Hilir di Data Dian